

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Eksistensi sebuah negara dalam kancah hubungan internasional saat ini mendesak sebuah negara untuk menjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan untuk memenuhi segala kebutuhan yang masing-masing negara terlibat untuk mencapainya. Hal ini merupakan pengetahuan yang mendasar dalam hubungan internasional kekinian suatu negara adalah tidak adanya negara yang tidak bergantung terhadap negara lain. Untuk itu eksistensi keberadaan sebuah negara bergantung pada kepemilikan sumber daya alam, teknologi, sumber daya manusia, militer dan lain sebagainya. Saat ini ilmu hubungan internasional mulai berkembang dengan pesat dan menjadi semakin kompleks dari sebelumnya, hal itu terjadi semakin banyaknya masing-masing negara menjalin sebuah hubungan kerjasama dan semakin banyaknya individu berinteraksi dengan individu lainnya melampaui batas teritorial negara. Untuk itu diperlukannya adanya sebuah aturan, norma atau etika untuk mensinkronkan hubungan antar aktor dalam hubungan internasional. (Jacson & Serense, 2005)

Indonesia merupakan sebuah negara yang berdaulat dan demokratis sejak kemerdekaannya tahun 1945. Sejak kemerdekaannya, Indonesia sudah menerapkan prinsip bebas aktif dalam kebijakan politik luar negerinya. Menurut Hatta politik bebas aktif adalah “bebas” berarti Indonesia tidak berada dalam kedua blok (blok Barat dan blok Timur) dan memilih jalan

sendiri untuk mengatasi persoalan internasional. Sedangkan “aktif” berarti upaya untuk bekerja lebih giat guna menjaga perdamaian dan ketegangan kedua blok. (Hatta, 1976) Hingga sampai saat ini prinsip tersebut tetap digunakan dalam politik luar negeri Indonesia untuk menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan banyak negara, serta berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Salah satunya adalah menjalin kerjasama dengan negara Turki.

Sejak kemerdekaan Turki pada tahun 1923, pada perkembangannya Turki kini disebut sebagai negara yang sangat diperhitungkan keberadaannya sebagai aktor hubungan internasional. Turki di bawah kepemimpinan Presiden Erdogan telah mampu menempatkan negaranya memiliki pengaruh yang sangat penting dalam panggung internasional serta mampu menunjukkan kredibilitasnya sebagai negara yang sejajar dengan negara maju lainnya. Turki telah mengalami perkembangan yang sangat pesat di berbagai bidang, mulai dari ekonomi, militer, sosial maupun teknologi selama dasawarsa ini. Turki kini juga menjadi salah satu anggota G20 (*Group of Twenty*), merupakan sebuah forum pertemuan antara negara-negara yang memiliki ekonomi terbesar untuk dapat menjalin kerjasama yang komprehensif sesama anggota. (Hardoko, 2016)

Indonesia sendiri diketahui sudah menjalin kerjasama bilateral yang cukup lama dengan negara Turki sejak abad ke – 18 ketika terjadinya kerjasama hubungan perdagangan antar kedua negara. Hubungan bilateral dimulai sejak Turki mengakui kemerdekaan Indonesia pada 29 Desember 1949 yang kemudian berlanjut terhadap di bangunnya hubungan diplomatik

pada tahun 1950. Perjanjian kerjasama ekonomi antara Indonesia – Turki ditandai dengan adanya *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Turkey on Economic and Technical Cooperation* (Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik) yang ditandatangani pada tahun 1982 yang menjadi payung kerjasama antara Indonesia dan Turki. Kemudian secara khusus kerjasama pada sektor pariwisata terus ditingkatkan sampai saat ini, melihat akan peluang pasar yang cukup besar dan banyaknya keuntungan yang di dapatkan. Untuk itu sektor pariwisata menjadi komponen yang penting dalam politik luar negeri antara Indonesia dan Turki. Perjanjian hubungan kerjasama kepariwisataan kedua negara ini mulai dikhususkan dengan adanya *Memorandum of Understanding MoU Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Turkey On Cooperation in Tourism* (Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki Mengenai kerjasama Pariwisata) yang di tandatangi pada tahun 1993.

Kemudian Indonesia berupaya terus meningkatkan hubungan kerjasama dengan Turki khususnya di bidang perdagangan dan investasi, perdagangan bilateral antara Indonesia dengan Turki mencapai 2,1 miliar dollar pada tahun 2008 dan diharapkan dapat terjadi peningkatan yang baik pada tahun-tahun berikutnya. Akan tetapi pada tahun 2009 nilai perdagangan bilateral mengalami penurunan yang signifikan menjadi 1,2 miliar dollar, karena faktor terjadinya krisis global. Untuk itu dalam upaya mengatasi krisis

global serta turunya nilai perdagangan Indonesia dengan Turki, pemerintah Indonesia dan Turki terus berupaya untuk meningkatkan hubungan kerjasama dalam banyak sektor seperti perdagangan, investasi, dan pariwisata. (Bambang, 2010)

Peningkatan hubungan bilateral Indonesia dan Turki juga menyoar kepada sektor industri pertahanan yaitu kerjasama terkait pengembangan Alutsista. Adanya kerjasama di bidang industri pertahanan dimulai pada masa era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2010. Penentuan kerjasama di bidang industri pertahanan di pengaruhi oleh kondisi pertahanan militer negara terkait perkembangan Alutsista Indonesia saat ini. Hal ini terjadi karena embargo yang dilakukan Amerika terhadap Indonesia terkait Alutsista membuat Indonesia tidak ingin bergantung terhadap Alutsista dari satu negara saja, oleh karena itu Indonesia menjalin kerjasama industri Alutsista dengan banyak negara lain salah satunya adalah Rusia dan Turki. Meskipun Amerika telah mencabut embargonya tidak lantas membuat Indonesia menutup kerjasama dengan negara lain dan tetap menjalin hubungan baik dengan Amerika. Kerjasama di bidang industri pertahanan dengan Turki di rasa sangat penting adanya untuk memenuhi kebutuhan Alutsista nasional serta dalam upaya menuju kemandirian Alutsista. (Viva, 2013)

Kerjasama di bidang industri pertahanan ini sangat bermanfaat untuk Indonesia, antara lain adalah: Pertama, Indonesia tidak bergantung terhadap Alutsista negara lain. Kedua, Indonesia dalam melakukan kerjasama di bidang industri pertahanan menginginkan adanya transfer teknologi dengan negara

mitra. Dengan adanya transfer teknologi maka keinginan Indonesia untuk menjadi negara yang mandiri terkait Alutsista dapat tercapai dan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan bagi sumber daya manusia di Indonesia. Ketiga, dengan adanya kerjasama industri pertahanan mampu mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk membeli Alutsista dengan negara lain. Dengan adanya industri pertahanan di negara sendiri, Indonesia mampu memproduksi Alutsistanya sendiri untuk memenuhi kebutuhan Alutsista nasional. Selain itu produk Alutsista yang di hasilkan oleh Indonesia juga dapat di export ke negara lain yang membutuhkan, keuntungan yang didapatkan akan sangat membantu terhadap perekonomian Indonesia.

Negara Turki merupakan negara mitra Indonesia yang sangat penting, hal ini dikarenakan letak geografis negara Turki berada di antara benua Eropa dan Asia yang menempatkan Turki berada pada posisi yang sangat penting di kawasan, selain itu ekonomi Turki yang terus meningkat menjadikan negara Turki masuk ke dalam salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia yang di buktikan dengan masuknya Turki sebagai salah satu anggota G20. Tidak hanya itu, negara Turki juga memiliki penduduk yang mayoritas masyarakatnya beragama muslim sama seperti di Indonesia. Hal itu semua tentunya menjadi alasan kenapa Indonesia menjadikan Turki sebagai mitra kerjasama yang sangat penting. Keuntungan yang di dapat dari hubungan kerjasama Indonesia – Turki mampu memperbaiki serta meningkatkan perekonomian negara masing-masing.

Hubungan yang baik antara Indonesia dan Turki terus ditingkatkan meskipun telah terjadi pergantian kepemimpinan di antara kedua negara.

Untuk itu pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi yang dimulai tahun 2014, hubungan kerjasama dengan Turki mengalami peningkatan yang cukup baik. Hal ini di tunjukan dengan kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Turki sebagai bentuk balasan atas kujungan Presiden Erdogan ke Indonesia, yang menghasilkan sejumlah tiga poin utama meliputi pengembangan kerjasama di bidang ekonomi melauai peluncuran *Indonesia-Turki Comprehensive Economic Partnership* atau IT-CEPA, pengembangan industri strategis dan serta *counter terrorism* pada tahun 2017. Diketahui bahwa pada tahun 2015 nilai perdagangan Indonesia – Turki mencapai 1,4 miliar dolar dengan Indonesia surplus sekitar 700 juta dolar, namun pada tahun 2016 keuntungan itu menurun sekitar 14%.

Kemudian yang menjadi pembahasannya adalah hubungan kerjasama Indonesia dengan Turki di bidang ekonomi tidaklah terlalu besar nilainya ketimbang dengan negara, seperti Amerika, China, India, Jepang¹. Adapun jika melihat data yang dikeluarkan oleh Kemendag RI, nilai perdagangan antara Indonesia dengan Turki selama tiga tahun ini terus mengalami penurunan yang signifikan. Untuk itu Indonesia perlu melakukan evaluasi terhadap permasalahan mengenai kerjasama ekonomi dengan Turki.

Dengan adanya latar belakang yang di jelaskan pada bagian ini maka penulis tertarik untuk mengetahui Politik Luar Negeri Indonesia dan kerjasama internasional antar kedua negara maka penelitian ini berjudul

¹ <http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/10-main-and-potential-commodities/10-main-commodities>

tentang **“Faktor-faktor Indonesia Kerjasama Bilateral Dengan Turki di Bidang Ekonomi Tahun 2014-2017”**

B. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian ilmiah biasanya dilakukan untuk memberikan gambaran objektif mengenai fenomena tertentu. Penulisan skripsi ini bertujuan antara lain untuk:

1. Penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan penulis dan mahasiswa jurusan hubungan internasional dal hal politik luar negeri khususnya negara Indonesia - Turki.
2. Untuk mengetahui kebijakan Luar Negeri Indonesia terkait kerjasama ekonomi dengan Turki.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi pengambilan kebijakan Luar Negeri Kerjasama di bidang ekonomi.
4. Untuk memenuhi persyaratan meraih gelar kesarjanaan starta satu (S-1) pada Program studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Rumusan Masalah

Penjelasan dari permasalahan tersebut kemudian akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan rumusan masalah sebagai berikut :

Mengapa Indonesia meningkatkan hubungan bilateral dengan Turki di bidang ekonomi tahun 2014-2017 ?

D. Kerangka Dasar Pemikiran

Untuk menganalisa penelitian ini secara mendalam, membutuhkan sebuah kerangka pemikiran untuk membangun sebuah pernyataan yang mengandung variabel-variabel yang memiliki keterkaitan untuk membangun sebuah fakta-fakta dari sebuah penelitian agar fakta tersebut menjadi sebuah karya ilmiah yang valid. Dalam menjawab rumusan masalah diatas, penulis menjawab pokok permasalahan dengan menggunakan sebuah kerangka pemikiran, baik teori maupun konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi pokok permasalahan. Dari pengertian tersebut secara gamblang teori bisa di katakan suatu pandangan atau persepsi mengenai suatu yang terjadi. (Mas'oed, 1990) Sedangkan konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu tau fenomena tertentu. Untuk menganalisa permasalahan yang ada, penulis menggunakan teori sebagai berikut:

Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri

Pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara dengan negara lainnya merupakan yang menarik untuk di analisa. Kebijakan luar negeri adalah bentuk upaya dari sebuah negara dalam mencapai tujuan-tujuan dengan keuntungan sebesar-besarnya atau memperkecil kerugian. Untuk itu terdapat faktor dalam mempengaruhi sebuah kebijakan luar negeri sebuah negara adalah para pengambil keputusan. Para pengambil keputusan tentu memiliki sebuah informasi yang dapat di pakai untuk membuat kebijakan luar negeri dengan berbagai alternative yang dimiliki dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Untuk menjelaskan bagaimana proses pengambilan kebijakan

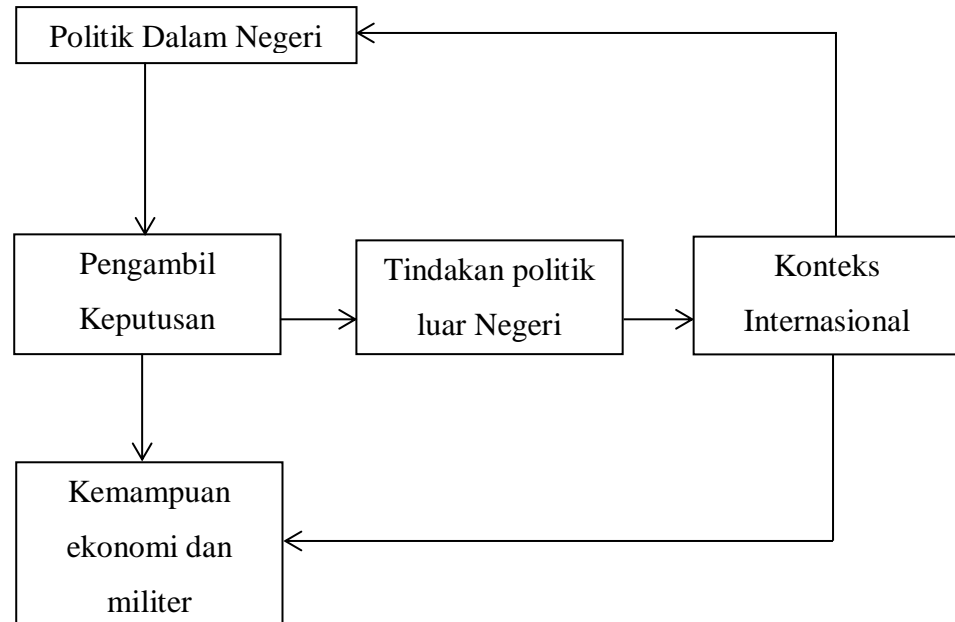
politik luar negeri Indonesia dengan Turki, maka penulis akan menggunakan teori pembuatan kebijakan luar negeri menurut William D. Coplin.

Menurut William D. Coplin, Teori pengambilan keputusan Luar Negeri atau Foreign Policy, Yaitu : (Coplin, 1992)

“apabila kita akan menganalisa kebijakan luar negeri suatu negara, maka kita harus mempertanyakan para pemimpin negara dalam membuat kebijakan luar negeri. Dan salah besar jika menganggap bahwa para pemimpin negara (para pembuat kebijakan luar negeri) bertindak tanpa pertimbangan. Akan tetapi sebaliknya, tindakan politik luar negeri tersebut dipandang sebagai akibat tiga konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil keputusan kebijakan luar negeri adalah kondisi politik dalam negeri, situasi ekonomi dan militer di negara tersebut, serta konteks internasional.”

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan di bawah ini :

Gambar 1.1 Bagaimana Empat Determinan mempengaruhi Tindakan Politik Luar Negeri



Sumber : William D. Coplin, Pengantar Politik Internasional, Suatu Telaah Teoritis, CV. Sinar Baru, Bandung, 1992.

Menurut gambar di atas, politik luar negeri dipengaruhi oleh kondisi politik dalam negeri, kemampuan ekonomi dan militer serta konteks internasional. Dalam hal ini Presiden atau Kepala Negara sebagai pengemban tugas bisa juga di sebut sebagai aktor individu dan aktor rasional, dimana model ini memandang politik luar negeri sebagai akibat dari tindakan si aktor rasional itu sendiri. Penghitungan secara rasional, untung – rugi dalam pengambilan keputusan politik dalam negeri terdapat kepentingan baik itu kepentingan Negara maupun kepentingan pengambil keputusan.

Fokus utama dalam penelitian adalah membahas mengenai kondisi politik dalam negeri, kondisi ekonomi dan militer, serta konteks

internasional. Ketiga determinan tersebut sangat sesuai dengan terciptanya kebijakan politik luar negeri Indonesia dalam menjalin kerjasama dengan negara Turki. Dimana mengenai kondisi dalam negeri, kemampuan ekonomi dan militer, dan konteks internasional yang dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri.

Dalam melihat kondisi politik dalam negeri menurut William D. Coplin, segala kebijakan politik luar negeri sangat dipengaruhi oleh kondisi politik dalam negeri. Hubungan antara aktor pengambil kebijakan luar negeri dengan kondisi politik dalam negeri yang dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri di sebut *policy influencer*. (Coplin, 1992) Seorang pengambil keputusan membutuhkan dukungan dari *policy influencer* sebagai dukungan politik untuk membantu mempertahankan rezim yang sedang berlangsung karena dukungan tersebut dapat membantu memperkuat kebijakan luar negeri yang dikeluarkan. Terdapat 4 jenis *policy influencer* yang mampu mempengaruhi kondisi politik dalam negeri dalam pembuatan kebijakan politik luar negeri menurut William D. Coplin : *bureaucratic influencers, partisan influencers, interest influencers, dan mass influencer*.

Kondisi politik dalam negeri Indonesia yang mempengaruhi kebijakan pembuat keputusan adalah adanya perjanjian atau undang-undang kerjasama Indonesia dengan Turki, adanya pengaruh dari partai politik berbasis islamis, adanya organisasi Islam di dalam negeri yang berkepentingan, serta pertimbangan jumlah penduduk Indonesia yang mayoritasnya beragama muslim. Indonesia telah menjalin kerjasama

dengan Turki sudah sejak lama, berbagai perjanjian antar kedua negara sudah dihasilkan. Karena itu, untuk menjaga keharmonisan hubungan antar kedua negara diperlukannya komitmen terhadap perjanjian yang sudah dibuat, meskipun telah berganti periode kepemimpinan kedua negara.

Selain itu, terdapat juga mengenai kondisi ekonomi serta politik di Indonesia, dimana Indonesia yang saat ini sedang memfokuskan pada pertumbuhan ekonomi nasional dengan berfokus pada peningkatan ekspor dan investasi dari negara lain khususnya negara Turki, hal ini merupakan salah satu janji yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama masa kampanye maupun menjabat sebagai Presiden adalah untuk meningkatkan ekonomi nasional kearah lebih tinggi.

Oleh karena kondisi politik dalam negeri Indonesia tersebut yang kemudian memilih Turki sebagai salah satu negara yang mendapatkan prioritas dalam meningkatkan hubungan bilateral. Hal ini dikarenakan Indonesia dengan Turki memiliki beberapa kesamaan diantaranya adalah sama-sama negara yang demokratis, memiliki penduduk yang mayoritasnya adalah muslim, serta aktif dalam merespon berbagai isu terkait dengan Dunia Islam.

Kepentingan di bidang ekonomi adalah dengan melakukan kerjasama dengan Turki diharapkan dapat meningkatkan perekonomian kedua negara baik dalam bidang perdagangan, investasi, maupun transfer teknologi dalam upaya menciptakan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi.

Sebelumnya di ketahui bahwa pada tahun 2015 nilai perdagangan Indonesia – Turki mencapai 1,4 miliar dolar dengan Indonesia surplus sekitar 700 juta dolar, namun pada tahun 2016 keuntungan itu menurun sekitar 14%. Dalam upaya untuk meningkatkan kerjasama ekonomi, pemerintah Indonesia dan Turki sudah melakukan penandatanganan perjanjian ekonomi komprehensif antara kedua negara yang tertuang dalam *Joint Ministerial Statement on the Launch of the Negotiations for Indonesia-Turkey Comprehensive Economic Partnership Agreement (IT-CEPA)*.

Sedangkan kemampuan militer sebuah negara, Indonesia sangat berkepentingan dalam upaya untuk meningkatkan stabilitas keamanan nasional serta kedaulatan sebuah negara jauh dari ancaman agresi militer. (Muhamad, 2014) Indonesia dengan Turki sudah menandatangani kerjasama industri pertahanan yang tertuang dalam *Agreement on Defense Industry Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Turkey* (Persetujuan tentang Kerjasama Industri Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Turki) pada tahun 2010, perjanjian tersebut didukung dengan adanya Undang-undang No.19 tahun 2014 tentang kerjasama industri pertahanan antara Indonesia dengan Turki. Poin utama dalam perjanjian tersebut adalah dilakukannya pengembangan kapasitas industri pertahanan masing-masing negara. Diharapkan dalam perjanjian tersebut dapat meningkatkan nilai ekonomi Indonesia serta memenuhi

kebutuhan Alutsista nasional untuk memperkuat pertahanan negara dari ancaman negara lain.

Melihat konteks internasional adalah saat ini Indonesia merupakan negara yang menempati posisi strategis dalam kancah perpolitikan internasional. Indonesia merupakan negara anggota PBB sejak tahun 1950, pendiri Gerakan Non Blok, Organisasi Kerjasama Islam, dan ASEAN. Selain itu Indonesia masuk kedalam G20 yang menempatkan Indonesia menjadi negara ekonomi terbesar. Indonesia mempunyai kepentingan dengan negara Turki karena Turki juga memiliki posisi strategis dalam perpolitikan internasional sama dengan Indonesia. Turki merupakan negara anggota PBB, Organisasi Kerjasama Islam, G20, dan NATO. Indonesia dan Turki juga sama-sama aktif dalam merespon berbagai isu-isu Dunia Islam, seperti mendukung kemerdekaan palestina, melawan terorisme, serta isu Rohingya di Myanmar.

E. Hipotesa

Untuk menjawab pertanyaan mengapa Indonesia meningkatkan hubungan bilateral dengan Turki di bidang ekonomi tahun 2014-2017, karena terdapat kepentingan Indonesia menjalin kerjasama bilateral dengan pemerintah Turki yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yaitu :

1. Faktor kondisi politik dalam negeri adalah adanya perjanjian kerjasama bilateral antara Indonesia –Turki, serta adanya kondisi ekonomi politik dalam negeri Indonesia.

2. Faktor Kemampuan ekonomi dan militer adalah adanya kepentingan Indonesia untuk meningkatkan perdagangan, investasi, serta pengembangan industri dalam negeri dengan Turki.
3. Faktor konteks internasional adalah Indonesia aktif dalam organisasi-organisasi internasional baik regional, kawasan, maupun dunia dan aktif dalam merespon isu-isu dalam Dunia Islam yang sama dengan Turki.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah bersifat deskriptif kuantitatif maupun kualitatif yaitu menggambarkan kepentingan Indonesia dalam kerjasama ekonomi dan pemberantasan terorisme Indonesia – Turki. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang serta perilaku diamati, sedangkan penelitian kuantitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk angka. Penulis perlu menggabungkan dua jenis penelitian ini dikarenakan diperlukannya data-data kuantitatif untuk menunjang dalam mendiskripsikan permasalahan yang ada, dan sebagai bukti kuat dari hasil penelitian yang telah dilakukan. (Salim, 2006)

2. Unit Analisis Penelitian

Terkait dengan pembahasan dalam penelitian, ada beberapa unit yang menjadi analisis dalam melakukan penelitian yaitu Pemerintah

Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Turki serta hubungannya tentang ditingkatkannya hubungan bilateral di bidang ekonomi tahun 2014-2017.

3. Data dan Jenis

Data adalah segala keterangan atau informasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan penelitian, data yang dibutuhkan penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang tersusun dalam bentuk-bentuk tidak langsung seperti dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang di teliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh penulis adalah dengan studi kepustakaan yang bersumber dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan baik itu berupa buku, jurnal ilmiah, surat kabar maupun majalah. Selain itu pencarian data juga dilakukan dengan melakukan *searching* di berbagai website di internet. (Suharsono, 1996)

5. Teknik Analisa

Untuk menjelaskan mengenai penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik analisa dengan tujuan untuk menjelaskan bagaimana kebijakan aktor negara dibuat. Adapun kebijakan yang dibuat oleh aktor negara pada dasarnya terdapat tiga level analisis, yaitu; level analisis sistem, level analisis negara, level analisis negara, dan yang terakhir adalah level analisis individu (Russett & Starr, 1996).

Adapun dalam menjelaskan analisa dalam penelitian ini penulis menggunakan tingkat level analisis negara. level analisis negara adalah penjelasan tentang perilaku negara ditentukan oleh faktor-faktor internal dari negara tersebut. Dimana pemerintah Indonesia memiliki kepentingan bilateral dengan negara Turki dalam bidang ekonomi, yang dipengaruhi oleh kondisi dalam negeri Indonesia yang berupaya untuk meningkatkan perekonomian nasional.

G. Jangkauan Penelitian

Dalam penulisan ini penulis akan membatasi bahasan penelitian mengenai hubungan bilateral Indonesia dengan Turki di bidang ekonomi pada tahun 2014 – 2017 di era kepemimpinan Presiden Jokowi. Pada tahun 2014 dimana Presiden Jokowi terpilih menjadi Presiden dan memulai pemerintahannya, hingga tahun 2017 dimulainya kunjungan bilateral Presiden Jokowi ke Turki.

H. Sistematika Penulisan

Bab I berisi pendahuluan yang meliputi, alasan penulisan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka dasar teoritik, hipotesa, teknik pengumpulan data, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang politik luar negeri Indonesia terhadap Turki sebelum tahun 2014. Di mulai dengan penjelasan tentang politik luar negeri Indonesia, sejarah hubungan Indonesia dengan Turki, kemudian dilanjut

dengan politik luar negeri Indonesia masa Presiden Soekarno, Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati.

Bab III berisi tentang politik luar negeri Indonesia terhadap Turki setelah tahun 2014. Dimulai dengan politik luar negeri Indonesia masa Presiden Jokowi, kerjasama dan perjanjian Indonesia – Turki, kerjasama ekonomi Indonesia – Turki, kerjasama industri peralatan militer.

Bab IV berisi tentang faktor-faktor penyebab Indonesia menjalin kerjasama dengan Turki. Menceritakan tentang faktor kondisi dalam negeri Indonesia, kondisi ekonomi dan militer, serta kondisi konteks internasional.

Bab V berisi tentang kesimpulan terkait penelitian yang sudah dilakukan tentang hubungan bilateral antara Indonesia dengan Turki di bidang ekonomi tahun 2014 – 2017.